



**Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits**

P-ISSN: 1978-0893, E-ISSN: 2714-7916

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>

Volume 16, No. 2, Desember 2022, Halaman 239 - 254

DOI: [10.24042/al-dzikra.v16i2.11784](https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i2.11784)

## **Relasi Mubādalah Antara Pemerintah Dan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 Dalam Q.S An-Nisa': 58-59**

---

**Ahmad Murtaza MZ**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[ahmadmurtaza378@gmail.com](mailto:ahmadmurtaza378@gmail.com)

**Raisa Zuhra Salsabila Awaludin**

UIN Sumatra Utara

[raisazuhra9@gmail.com](mailto:raisazuhra9@gmail.com)

---

---

Received: 13-04-2022

Revised: 13-08-2022

Accepted: 30-08-2022

---

### **Abstract**

*This article explores the relationship between government and society found in Q.S An-Nisa' (4): 58-59 using Qira'ah Mubādalah. Qira'ah Mubādalah is a method involving two parties that embodies the concepts of reciprocity and collaboration between the two involved parties. The steps of the study are as follows: First, determine and authenticate the Islamic teachings contained in global books that serve as the foundation for comprehension; second, identify the primary ideas contained in the texts to be analyzed; third, deduce from the second step the gender that is not indicated in the text from the text's major premise. The data source for this qualitative study is publications on the topic. According to the findings of this study, the government and society must rebuild reciprocal ties to create post-pandemic progress. This article also discusses the education and health sectors. According to the author, these*

*two sectors are among the other two that require repair and renewal.*

**Keywords:** *Covid-19; Government; Mubādahah; QS. an-Nisa: 58-59; Society.*

### **Abstrak**

*Artikel ini mendiskusikan tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang terdapat dalam Q.S An-Nisa' (4): 58-59 dengan menggunakan Qira'ah Mubādahah. Qira'ah Mubādahah merupakan pendekatan yang melibatkan dua belah pihak yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kesalingan dan kerja sama antara dua belah pihak yang berkaitan. Adapun langkah-langkahnya Pertama, menentukan dan menegaskan prinsip dalam ajaran Islam yang terdapat dalam teks-teks universal yang menjadi dasar dari pemahaman. Kedua, menemukan pemikiran inti yang tersimpan dalam teks-teks yang akan dilakukan penafsiran. Ketiga, menurunkan ide pokok dari teks yang terdapat dalam langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang sumber datanya berasal dari artikel-artikel yang terkait dengan tema ini. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pemerintah dan masyarakat seyogyanya membangun kembali hubungan yang resiprokal sehingga dapat menciptakan kemajuan pasca pandemi. Artikel ini pula menyoroti dua sektor, yakni: pendidikan dan kesehatan. Yang kedua sektor ini menurut penulis salah dua dari sektor lain yang harus diperbaiki dan diperbaharui.*

**Kata kunci:** *Covid-19; Masyarakat; Mubādahah, Pemerintah; QS. an-nisa: 58-59.*

### **A. Pendahuluan**

Q.S An-Nisa' (4): 58-59 selama ini dipahami sebagai landasan untuk mentaati pemimpin setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata taat kepada pemimpin atau pemerintahan tidak serta-merta mengabaikan masyarakat di dalam sistem pemerintahan. Kedua elemen ini penting karena adanya ikatan hubungan sebagai negara demokrasi.<sup>1</sup> Hubungan aktif antara

---

<sup>1</sup> Ellya Rosana, 'Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal TAPIS*, 12.1 (2016), hlm. 38–53.

<sup>2</sup> Dadi Junaedi Iskandar, 'Pentingnya Partisipasi Dan Peranan

pemerintah dengan masyarakat ataupun sebaliknya menjadikan kebijakan dapat diterima dan diaplikasikan dengan baik.<sup>2</sup> Membangun hubungan baik antara pemimpin dengan masyarakat merupakan gambaran dari sebuah negara yang berasaskan demokrasi.

Kajian yang membahas fenomena pemerintah dan masyarakat memiliki kecondongan terhadap tiga sudut pandang. Pertama yaitu telaah atas kebijakan pemerintah seputar aturan-aturan harus dipatuhi dan dijalani oleh masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Agus Joharuddin dkk, bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat khususnya di masa pandemi Covid-19 karena kebijakan yang dilakukan untuk upaya lebih baik.<sup>3</sup> Kedua studi mengenai pentingnya komunikasi dengan melibatkan stekholder antara pemerintah dengan masyarakat. Muazzinah dalam tulisannya mengulas bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk integrasi antara masyarakat dan pemerintah melalui ulama khususnya dalam penanganan Covid-19.<sup>4</sup> Ketiga studi yang membahas atas hak yang harus pemerintah penuhi terhadap masyarakat. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Anwar di Maluku, yang mana hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan edukasi seputar Covid-19 masih belum dilakukan secara maksimal.<sup>5</sup> Dari studi-studi yang telah dipaparkan sebelumnya masih belum ada studi yang secara fokus melihat relasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam Q.S An-Nisa' (4): 58-59.

---

<sup>2</sup> Dadi Junaedi Iskandar, 'Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik', *Jurnal: Ilmu Administrasi*, 14.1 (2017), hlm. 17–35.

<sup>3</sup> Agus Joharudin and others, 'Panic Syndrom Covid-19: Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan Pemerintah', *Jurnal Perpektif*, 4.1 (2020), hlm. 44–53.

<sup>4</sup> Muazzinah, Zakki Fuad Khalil, and Cut Zamharira, 'Integrasi Antara Pemerintah Dan Ulama Dalam Penangan Covid-19 Di Aceh', *Jurnal El-Riyasah*, 12.2 (2021), hlm. 268–78.

<sup>5</sup> Arman Anwar and Richard Marsilio Waas, 'Hak Atas Informasi, Edukasi Dan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Adat Di Maluku Selama Pandemi Covid- 19', *SASI*, 27.28 (2021), 149–59 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.454>>.

Kepercayaan yang menurun dari masyarakat selama pandemi yang bisa dilihat melalui survei-survei yang telah beredar, menandakan adanya hubungan yang cukup renggang antara pemerintah dan masyarakat.<sup>6</sup> Dari sini dapat dipahami perlunya memperbaiki kembali relasi antara pemerintah dan masyarakat khususnya Pasca Covid-19. Baik pemerintah ataupun masyarakat merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan perlunya kembali membangun hubungan resiprokal antara keduanya atau istilah yang penulis pakai adalah *mubādalah*.

*Mubādalah* merupakan sebuah pandangan dan pemahaman dalam hubungan yang melibatkan dua pihak, dan di dalamnya terkandung nilai kerja sama, timbal baik dan tertanam prinsip resiprokal.<sup>7</sup> Walaupun dalam praktiknya selama ini *mubādalah* hanya terbatas dalam hubungan antara pria dan wanita, namun *mubādalah* hakikatnya juga terbuka untuk membentuk relasi antara masyarakat dan pemerintah.<sup>8</sup> Pembentukan kembali relasi antara masyarakat dan pemerintah dalam bingkai *mubādalah*, kita perlu mengetahuinya melalui Q.S An-Nisa' (4): 58-59. Pembacaan kedua ayat ini harus secara bersamaan agar dapat mengetahui spirit dari ayat tersebut.<sup>9</sup>

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah QS. An-Nisa' [4]: 58-59 berikut

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

---

<sup>6</sup> Bidara Pink, 'Kepercayaan Terhadap Pemerintah Menurun', *KONTAN.CO.ID*, 2021 <<https://insight.kontan.co.id/news/kepercayaan-terhadap-pemerintah-menurun>>; Dwi Hadya Jayani, 'LSI: Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi Dalam Tangani Covid-19 Menurun', *Lembaga Survei Indonesia*, 2021 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/19/lsi-kepercayaan-publik-terhadap-jokowi-dalam-tangani-covid-19-menurun>>.

<sup>7</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

<sup>8</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah Mengaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubālah* (Bandung: Afkurna, 2021).

<sup>9</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2007).

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat(58). Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (59).

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam QS. An-Nisa [4]: 58-59 dengan menggunakan metode *Qirā'ah Mubādalah* yang telah dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Penelitian ini penting dilakukan untuk dilakukan sebagai upaya membangun relasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah pasca pandemi covid-19. Karena masyarakat maupun pemerintah sama-sama merasakan kekacauan yang dialami selama covid-19 khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode *Qirā'ah Mubādalah*.

## **B. Qirā'ah Mubādalah**

Istilah *Qirā'ah Mubādalah* dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Faqihuddin lahir pada tanggal 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat. Pendalaman ilmu agama telah ia dapati sejak mondok di Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangan, Cirebon (1983-1989) di bawah asuhan dari K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori dan K.H. Husein Muhammad. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Damaskus Syiria di Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Damaskus (1990-1996). Ia melanjutkan pendidikan tingginya di Internasional Islamic University Malaysia dengan konsentrasi pengembangan Zakat. Selanjutnya pada tahun 2009-2015 ia menyelesaikan program doktoralnya di UGM Yogyakarta.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Kodir, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Gender Dalam Islam*.

Sebagai seorang sarjana muslim, Faqihuddin sangat produktif dalam dunia tulis menulis. Di antara karya-karyanya adalah *Shalawat Keadilan: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (2003), *Bangga menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam* (2004), *Memilih Monogami; Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadis* (2005), *Bergerak menuju Keadilan; Pembelaan Nabi terhadap Perempuan* (2006), *Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions* (2007), *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial* (2017), *As-Sittin al-Adliyyah* (2013), dan lainnya.

Dari beberapa karya Faqihuddin di atas dan juga telah penulis sebutkan di atas yang menjadi rujukan primer atas pendekatan *mubādalāh* adalah buku *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (2019). Dalam bukunya Faqihuddin menerangkan tiga langkah metodis dalam mengaplikasikan pendekatan tersebut. *Pertama*, menentukan dan menegaskan prinsip dalam ajaran Islam yang terdapat dalam teks-teks universal yang menjadi dasar dari pemahaman. Konsep prinsip ini terbagi menjadi dua prinsip umum (*al-mabādī'*) dan prinsip khusus (*al-qawā'id*). Maksud dari prinsip ialah ajaran yang melampaui dari jenis kelamin, seperti keimanan yang menjadi dasar dalam segala perbuatan. Lebih jauh, Faqihuddin menjelaskan jika ayat-ayat bersifat prinsip cukup berhenti pada langkah pertama saja dengan menemukan pandangan kesalingan, keseimbangan dan keadilan.<sup>11</sup> *Kedua*, menemukan pemikiran inti yang tersimpan dalam teks-teks yang akan dilakukan penafsiran. *Ketiga*, menurunkan ide pokok dari teks yang terdapat dalam langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.<sup>12</sup>

Sebagaimana langkah-langkah metodis yang telah dikemukakan oleh Faqihuddin, pada Q.S An-Nisa' (4): 58-59 cukup berhenti pada langkah pertama saja, karena pada ayat ini berisikan prinsip umum (*al-mabādī'*) yakni pemberian amanah,

---

<sup>11</sup> Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Gender Dalam Islam*.

<sup>12</sup> Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Gender Dalam Islam*.

keadilan dan ketaatan. Kedua prinsip tersebut tidak mengarah kepada hal-hal yang berat sebelah. Akan tetapi, perlunya pemahaman lebih lanjut mengenai amanah dan ketaatan pada kedua ayat tersebut melalui dinamika penafsiran yang telah disajikan oleh ahli tafsir.

### C. Pandangan Ahli Tafsir pada Q.S An-Nisa' (4): 58-59

Turunnya ayat 58 dalam surat An-Nisa' ini merupakan perintah untuk memberikan amanah kepada ahlinya. Lebih jauh, tercatat dalam asbabun nuzul ayat ini merupakan perintah agar Nabi tidak menjadi pemegang kunci ka'bah dan kunci tersebut diserahkan kepada Utsman bin Thalhah al-hajiby dari Abni Abdiddar. Selanjutnya, turunnya ayat 59 disebabkan polemik terhadap patuhnya pasukan kepada pimpinannya untuk memulai peperangan. Lebih jauh, Ibnu Hajar menjelaskan maksud dari ayat ini adalah jika terdapat perselisihan dan kebingungan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya.

Abu Ja'far dalam tafsirnya berpandangan amanah yang dimaksud adalah kepercayaan dalam segala urusan dan juga hak-hak masyarakat yang telah masyarakat percayakan kepada seorang pemimpin. Maka, seyogyanya bagi para pemimpin agar berlaku adil dan bijak serta bertanggung jawab. Adapun perintah ketaatan yang dimaksud ialah taat pada Allah dan Rasul baik yang telah diperintahkan ataupun dilarang baik pada semasa hidup Rasul dan setelah wafatnya. Adapun ketaatan pada pemimpin maksudnya perintah yang membawa pada kebaikan dan kemaslahatan umum.<sup>13</sup>

Selanjutnya, Sayyid Quthb mengonsepan amanah dalam *pertama*, amanat besar yakni amanah yang menghubungkan secara langsung antara Allah dan manusia seperti keimanan, hidayah, dan lainnya. *kedua* amanat syahadat sebagai persaksian terhadap ajaran Islam. *Ketiga*, amanat bermuamalah yang posisinya di antara kedua amanah yang telah disebutkan di atas. Bermuamalah di sini maksudnya ialah titipan materi, kesetiaan rakyat pada pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya, dan lainnya. juga

---

<sup>13</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* Vol. 2 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007).

dalam penetapan hukum harus berlaku adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sedangkan ketaatan menurutnya ialah ketaatan terhadap syari'at Allah dan Rasulnya juga taat kepada pemimpin yang patuh dan taat dalam syari'at Allah.<sup>14</sup>

Lebih jauh Wahbah Az-Zuhaili menerangkan ayat ini sebagai perintah untuk bertanggung jawab dalam menjalani amanah, baik amanah yang berkaitan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan hak Allah. Sedangkan keadilan menurutnya sangat erat dengan pemerintahan, yang mana melalui keadilan setiap orang akan mendapatkan haknya. Selanjutnya, ketaatan dalam ayat tersebut adalah taat kepada Allah dengan cara melaksanakan hukum Allah, taat kepada Nabi sebagai penjelas hukum Allah, dan taat kepada pemimpin.<sup>15</sup>

Di sisi lain, Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa amanat sama dengan aman maka orang yang memiliki amanat dan bertanggung jawab maka aman bangsa dan negaranya. Berkaitan dengan keadilan, ia menjelaskan bahwa keadilan erat kaitannya dengan amanat dan harus ditegakkan dengan cara yang tepat dan benar. Juga ketaatan dalam ayat ini sebagai penjelas agar menjadi taat kepada Allah, Rasulnya, dan para pemimpin yang telah diberikan amanat.<sup>16</sup> Lebih jauh Hasbie menuliskan bahwa amanat ialah melaksanakan perintah (Allah) dan menjauhi larangan juga menjaga amanat kepada sesama. Adapun keadilan yang dimaksud ialah ketika pemimpin berkuasa maka berlaku adil dalam tiap urusan. Kemudian ketaatan di sini ialah taat kepada pemimpin dengan syarat terlebih dahulu menjalankan amanat Allah, taat pada rasul serta menetapkan aturan dengan adil.<sup>17</sup> Dalam penjelasan Qurasih Shihab bahwa amanat sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain agar dijaga laku dikembalikan kembali pada pemiliknya. Mengenai keadilan menurutnya harus ditegakkan tanpa membedakan kepercayaan, keturunan ataupun ras.

---

<sup>14</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Quran Di Bawah Naungan Alquran*, Vol. 12 (Jakarta: Gema Insani, 2004).

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Vol. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2004).

<sup>16</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 1 (Singapura: Singapura Pustaka Nasional PTE LTD, 1999).

<sup>17</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majdi An-Nur*, Vol. 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).



Sedangkan ketaatan tetap mendahulukan Allah, Rasul, dan pemimpin yang memiliki wewenang dalam urusan kaum muslimin.<sup>18</sup>

Dari dinamika penafsiran yang telah disebutkan di atas, kata amanat, keadilan dan ketaatan semuanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam mempercayai sesuatu amanat haruslah kepada orang yang tepat, juga keadilan harus ditegakkan tanpa melihat latar belakang seseorang dan ketaatan selain pada perintah Allah dan Rasulnya, harus taat pula pada pemimpin yang selalu memiliki kebijakan dengan tujuan kemaslahatan umat. Maka dari itu perlunya kedua ayat ini dipahami agar spirit dan etik dari ayat Al-Qur'an tidaklah hilang.<sup>19</sup>

#### **D. Implikasi Relasi Mubādalah antara Masyarakat dan Pemerintah Pasca Covid-19**

Banyak sektor yang telah diserang Covid-19 akan tetapi di sini hanya membahas dua sektor saja melalui pendekatan mubādalah dalam membentuk relasi kesalingan antara masyarakat dan pemerintah pasca Covid-19. Pembahasan secara mendalam terkait dua faktor ini karena dua sektor ini pula yang mendapatkan banyak intensi baik dari pemerintah maupun masyarakat.

##### **1. Relasi Mubādalah dalam Kesehatan**

Saat pandemi Covid-19 dan tingginya angka kematian tentu yang menjadi sorotan utama ialah kesehatan. Problem kesehatan cukup menghantam Indonesia dengan datangnya 4 gelombang Covid-19.<sup>20</sup> Bahkan Jakarta mendapat sorotan WHO karena tingginya lonjakan kasus Covid-19.<sup>21</sup> Selain itu

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2021).

<sup>19</sup> Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Terj. Shulkhah Dan Sahiron Syamsuddin (Bantul: Baitul Hikmah Press, 2020).

<sup>20</sup> Irwandy, '4 Gelombang Besar Pandemi Covid-19 Menghantam Sistem Pelayanan Kesehatan', *The Conversation*, 2020 <<https://theconversation.com/4-gelombang-besar-pandemi-covid-19-menghantam-sistem-pelayanan-kesehatan-142049>>.

<sup>21</sup> Tommy Patrio Sorongan, 'Kasus Covid Jakarta Jadi Sorotan WHO, Ancaman Gelombang 3?', *CNBC Indonesia*, 2021 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211126064354-4-294553/kasus-covid-jakarta-jadi-sorotan-who-ancaman-gelombang-3>>.

pula terkait fasilitas kesehatan di rumah sakit sangat memprihatinkan dari fasilitas yang kurang memadai, tenaga kesehatan yang kelelahan sampai kesalahan dalam penanganan.<sup>22</sup>

Pasca Covid-19 perlunya pemerintah memperhatikan lagi relasi antara pemerintah dengan masyarakat khususnya dalam kesehatan. Oleh karenanya, di sini peran relasi *mubādalah* dalam kesehatan ialah pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama seperti pemerintah membuat kebijakan untuk mematuhi protokol kesehatan maka seyogyanya masyarakat melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Sebagaimana yang dituliskan oleh Arman Anwar dalam artikelnya dalam kasus ini di Maluku, yang mana pemerintah belum bisa secara maksimal memberikan perhatian khususnya dalam bidang kesehatan kepada masyarakat.<sup>23</sup> Hal serupa juga dinyatakan Moch. Halim Sukur dkk., yang mana edukasi kesehatan khususnya pasca Covid-19 harus tetap dilakukan dan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.<sup>24</sup> Maka dari itu, pemerintah sebagai pemangku amanat merancang kebijakan dengan tujuan maslahat sedangkan masyarakat bersama-sama harus patuh dan melaksanakan perintah tersebut. Gambaran ini sebagaimana yang dituliskan Sayyid Quthb bukti kesetiaan pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat kepada pemerintah.<sup>25</sup>

Sebagai antisipasi wabah seperti Covid-19 ini seharusnya pemerintah dapat lebih terbuka tentang informasi terkait

---

<sup>22</sup> BBC, 'Ovid: "Fungsi Fasilitas Kesehatan Kolaps Dan Nakes Kelelahan", Apakah Cukup Dijawab Dengan Penambahan Tempat Tidur Perawatan?', *BBC Indonesia*, 2021 <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57878074>>; Sopian Hadi, 'Covid-19 Dan Problem Rumah Sakit', *Ombudsman RI*, 2020 <<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--covid-19-dan-problem-rumah-sakit>>; Thr, 'LaporCovid19 Kritik Salah Sistem RS Tangani Pasien Darurat', *CNN Indonesia*, 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210303103745-20-613071/laporcovid19-kritik-salah-sistem-rs-tangani-pasien-darurat>>.

<sup>23</sup> Anwar and Waas.

<sup>24</sup> Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, and Ray Faradillahisari N, 'Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan', *Journal Inicio Legis*, 1.1 (2020), hlm. 1–17.

<sup>25</sup> Quthb.

wabah ataupun virus lainnya dengan segera untuk diteliti melalui epidemiologi, pemeriksaan, perawatan, isolasi penderita, dan selalu meningkatkan fasilitas kesehatan.<sup>26</sup> Sedangkan masyarakat harus menaati kebijakan-kebijakan ataupun langkah-langkah dari pemerintah demi kemaslahatan bersama bukan salah satu pihak saja. Hal ini merupakan bentuk manifestasi dari ketaatan masyarakat terhadap pemerintah yang merealisasikan poin ketaatan yang terdapat pada QS. An-Nisa' [4]: 58-59.

## 2. Relasi Mubādalah dalam Pendidikan

Covid-19 selain menyerang kesehatan juga berimbas pada pendidikan di Indonesia. Faktor tidak siap baik secara fasilitas dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga mental menjadikan banyaknya permasalahan pada bidang pendidikan seperti siswa yang depresi akibat banyaknya tugas,<sup>27</sup> akses internet yang kurang stabil,<sup>28</sup> ketertinggalan siswa dalam menerima materi pembelajaran,<sup>29</sup> dan banyak lagi cerita-cerita lainnya tentang pendidikan di Indonesia selama pandemi. Di balik itu semua menurut Nadiem Makarim bahwa adanya pandemi ini bisa menjadi ledakan untuk perkembangan pendidikan di Indonesia.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Siti Nurhalimah, 'Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.6 (2020), 543–54 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324>>.

<sup>27</sup> Kompas.com, 'Cerita Lia Hampir Setahun Belajar Jarak Jauh Karena Pandemi, Mengaku Sedih, Kesepian, Dan Putus Asa', *Kompas.Com*, 2021 <<https://regional.kompas.com/read/2021/02/19/06560031/cerita-lia-hampir-setahun-belajar-jarak-jauh-karena-pandemi-mengaku-sedih?page=all>>.

<sup>28</sup> Yopi Makdori, 'Cerita Anak Papua Belajar Daring Di Tengah Pandemi Corona Covid-19', *Liputan 6*, 2020 <<https://www.liputan6.com/news/read/4229155/cerita-anak-papua-belajar-daring-di-tengah-pandemi-corona-covid-19>>.

<sup>29</sup> Callistasia Wijaya, 'Sekolah Di Tengah Pandemi Covid-19: Para Siswa "tertinggal" Secara Akademik, Orang Tua: "Saya Pilih Anak Selamat"', *BBC News Indonesia*, 2020 <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52661836>>.

<sup>30</sup> CNN Indonesia, 'Nadiem Ibaratkan Pandemi Covid-19 Ledakan Bagi Pendidikan', *CNN Indonesia*, 2020 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200731062239-20-530894/nadiem-ibaratkan-pandemi-covid-19-ledakan-bagi-pendidikan>>.

Dari banyaknya problem pendidikan yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 perlunya kembali menata dengan baik pendidikan di Indonesia. Di sini peran dari relasi *mubādalah* dalam bidang pendidikan. Pemerintah bisa lebih mengetahui kondisi fasilitas pendidikan di Indonesia terkhusus kelengkapan teknologi<sup>31</sup> sehingga untuk ke depannya masyarakat terkhusus siswa ataupun mahasiswa dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan baik.<sup>32</sup> Nilai kesalingan yang diupayakan ialah bagaimana pemerintah dan masyarakat sama-sama beradaptasi dengan teknologi, SDM, dan kebijakan-kebijakan yang berenergi antara keduanya sehingga terus terciptanya inovasi-inovasi baru dalam bidang pendidikan.<sup>33</sup>

Inovasi dalam bidang pendidikan tidak hanya berkuat pada masyarakat perkotaan saja. Ini pula yang perlu diperhatikan oleh segenap pengemban amanat rakyat. Yang mana pemerintah harus mampu menerapkan inovasi pendidikan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil yang selama ini masih sering diabaikan dalam bidang pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga amanat dan juga menciptakan keadilan kepada seluruh masyarakat untuk mencapai pendidikan yang lebih layak. Sehingga masyarakat yang telah mendapatkan keadilan dengan sebaik-baiknya dapat taat dan mematuhi segala aturan yang telah dibuat oleh para pengemban amanat rakyat.

## E. Kesimpulan

Mubādalah merupakan sebuah pandangan dan pemahaman dalam hubungan yang melibatkan dua pihak, dan di dalamnya terkandung nilai kerja sama, timbal baik dan tertanam prinsip resiprokal. Seyogyanya adanya hubungan timbal balik atau

---

<sup>31</sup> Nikodemus Thomas Martoredjo, 'Pandemi Covid-19: Ancaman Atau Tentangan Bagi Sektor Pendidikan?', *Jurnal Binus*, 7.1 (2020).

<sup>32</sup> Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Hascaryo Pramudibyanto, and Barokah Widuroyekti, 'Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Sinestesia*, 10.1 (2020), hlm. 41–48.

<sup>33</sup> Aan Ansori and Ahmad Fitriyadi Sari, 'Inovasi Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1.2 (2020), hlm. 133–48.

kesalingan antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan kemajuan Indonesia pasca pandemi.

Dua sektor yang menjadi sorotan dalam tulisan ini, pertama sektor kesehatan yang mana tidak siapnya fasilitas, kurangnya tenaga kerja sampai abainya pada protokol kesehatan terlihat kurangnya nilai mubādalah pada masyarakat dan pemerintah. Kedua, sektor pendidikan yang penting bagi siswa dan mahasiswa juga turut menjadi sorotan seperti akses internet dan fasilitas lainnya. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat seharusnya lebih meningkatkan kembali relasi mubādalah agar amanat, keadilan, dan ketaatan dapat seiring berjalan demi kemajuan Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Amrullah, Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar, Vol. 1* (Singapura: Singapura Pustaka Nasioanal PTE LTD, 1999)
- an-Naisaburi, Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul* (Surabaya: Penerbit Surabaya, 2014)
- Ansori, Aan, and Ahmad Fitriyadi Sari, 'Inovasi Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1.2 (2020)
- Anwar, Arman, and Richard Marsilio Waas, 'Hak Atas Informasi, Edukasi Dan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Adat Di Maluku Selama Pandemi Covid- 19', *SASI*, 27.28 (2021), 149–59 <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.454>
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Depok: Gema Insani, 2009)
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majdi An-Nur, Vol. 1* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)
- Az-Zuzahili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir, Vol. 1* (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- BBC, 'Ovid: "Fungsi Fasilitas Kesehatan Kolaps Dan Nakes

- Kelelahan”, Apakah Cukup Dijawab Dengan Penambahan Tempat Tidur Perawatan?’, *BBC Indonesia*, 2021  
\_ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57878074>
- CNN Indonesia, ‘Nadiem Ibaratkan Pandemi Covid-19 Ledakan Bagi Pendidikan’, *CNN Indonesia*, 2020  
\_ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200731062239-20-530894/nadiem-ibaratkan-pandemi-covid-19-ledakan-bagi-pendidikan>
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2007)
- Hadi, Sopian, ‘Covid-19 Dan Problem Rumah Sakit’, *Ombudsman RI*, 2020  
\_ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--covid-19-dan-problem-rumah-sakit>
- Irwandy, ‘4 Gelombang Besar Pandemi Covid-19 Menghantam Sistem Pelayanan Kesehatan’, *The Conversation*, 2020  
\_ <https://theconversation.com/4-gelombang-besar-pandemi-covid-19-menghantam-sistem-pelayanan-kesehatan-142049>
- Iskandar, Dadi Junaedi, ‘Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik’, *Jurnal: Ilmu Administrasi*, 14.1 (2017)
- Jarir Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin, *Tafsir Ath-Thabari Vol. 2* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007)
- Jayani, Dwi Hadya, ‘LSI: Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi Dalam Tangani Covid-19 Menurun’, *Lembaga Survei Indonesia*, 2021  
\_ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/19/lsi-kepercayaan-publik-terhadap-jokowi-dalam-tangani-covid-19-menurun>
- Joharudin, Agus, Muhammad Andi Septiadi, Sephia Maharani, Tarisma Ditya Aisi, and Nurwahyuningsih, ‘Panic Syndrom Covid-19: Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan Pemerintah’, *Jurnal Perpektif*, 4.1 (2020)
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun, Hascaryo Pramudibyanto, and Barokah Widuroyeki, ‘Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19’, *Jurnal Sinestesia*, 10.1 (2020)
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah Mengaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubālah* (Bandung:

- Afkurna, 2021)
- , *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
- Kompas.com, 'Cerita Lia Hampir Setahun Belajar Jarak Jauh Karena Pandemi, Mengaku Sedih, Kesepian, Dan Putus Asa', *Kompas.Com*, 2021  
— <https://regional.kompas.com/read/2021/02/19/06560031/cerita-lia-hampir-setahun-belajar-jarak-jauh-karena-pandemi-mengaku-sedih?page=all>
- Makdori, Yopi, 'Cerita Anak Papua Belajar Daring Di Tengah Pandemi Corona Covid-19', *Liputan 6*, 2020  
— <https://www.liputan6.com/news/read/4229155/cerita-anak-papua-belajar-daring-di-tengah-pandemi-corona-covid-19>
- Martoredjo, Nikodemus Thomas, 'Pandemi Covid-19 : Ancaman Atau Tentangan Bagi Sektor Pendidikan?', *Jurnal Binus*, 7.1 (2020)
- Muazzinah, Zakki Fuad Khalil, and Cut Zamharira, 'Integrasi Antara Pemerintah Dan Ulama Dalam Penangan Covid-19 Di Aceh', *Jurnal El-Riyasah*, 12.2 (2021)
- Nurhalimah, Siti, 'Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.6 (2020), 543–54  
— <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324>
- Pink, Bidara, 'Kepercayaan Terhadap Pemerintah Menurun', *KONTAN.CO.ID*, 2021  
— <https://insight.kontan.co.id/news/kepercayaan-terhadap-pemerintah-menurun>
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil-Quran Di Bawah Naungan Alquran, Vol. 12* (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Rosana, Ellya, 'Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal TAPIS*, 12.1 (2016)
- Saeed, Abdullah, *Pengantar Studi Al-Qur'an, Terj. Shulkhah Dan Sahiron Syamsuddin* (Bantul: Baitul Hikmah Press, 2020)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Vol. 2* (Tangerang: Lentera Hati, 2021)
- Sorongan, Tommy Patrio, 'Kasus Covid Jakarta Jadi Sorotan WHO, Ancaman Gelombang 3?', *CNBC Indonesia*, 2021  
— <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211126064354-4-294553/kasus-covid-jakarta-jadi-sorotan-who-ancaman->

gelombang-3

Sukur, Moch Halim, Bayu Kurniadi, and Ray Faradillahisari N, 'Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan', *Journal Inicio Legis*, 1.1 (2020)

Thr, 'LaporCovid19 Kritik Salah Sistem RS Tangani Pasien Darurat', *CNN Indonesia*, 2021  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210303103745-20-613071/laporcovid19-kritik-salah-sistem-rs-tangani-pasien-darurat>

Wijaya, Callistasia, 'Sekolah Di Tengah Pandemi Covid-19: Para Siswa "tertinggal" Secara Akademik, Orang Tua: "Saya Pilih Anak Selamat"', *BBC News Indonesia*, 2020  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52661836>

**Copyright holder :**

© Ahmad Murtaza MZ and Raisa Zuhra Salsabila Awaludin

**This article is licensed under:**

